

ISSN: 2460-1896  
e-ISSN: 2541-5573

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

# > Islamic Economics Journal

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik)

**Arie Rachmat Sunjoto**

Business System Analysis Based on Multi Level Marketing in The Perspective of Islamic Business Ethics)

**Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania**

Tax Exemption Goods Trade on ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics

**Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan**

Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam

**Syamsuri, Sabila Rosyida**

Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo Tahun 2017-2018)

**Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto**

Akad *Wakālah Bil Ujrah* PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari *Maqāsid Syari'ah* Imam Syatibi

**Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda**

The Effect of Price And Brand Image of Smartphone Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers (Case Study Student University of Darussalam Campus 6 Magelang)

**Fadly Arif, Imam Haryadi**

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Islamic Economics Journal

---

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

ISSN: 2460-1896

e-ISSN: 2541-5573

---

## DEWAN REDAKSI

Y. Suyoto Arief (UNIDA Gontor)  
Khoirul Umam (UNIDA Gontor)  
Royyan Ramdhani Djayusman (UNIDA Gontor)  
Masyhudi Muqorobin (UMY Yogyakarta)  
Heri Sudarsono (UII Yogyakarta)  
Muhammad Zeeshan Farukh (ACIE Pakistan)

## PIMPINAN REDAKSI

Adib Susilo

## WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Satria Hibatal Azizy

## SEKRETARIS REDAKSI

Muhammad Khafidh Abdillah bil Haq

## PUBLIKASI

Ahmad Faris Faisal

## ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)  
Jl. Raya Siman Km.6 Ponorogo, Telp. (0352) 3574562; Fax. (0352) 488182  
Email: [iej@unida.gontor.ac.id](mailto:iej@unida.gontor.ac.id)

Islamic Economics Journal, terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember), sebagai sarana pengembangan ilmu ekonomi Islam. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang sesuai dengan sifatnya sebagai jurnal pengembangan ilmu ekonomi Islam. Naskah yang dikirim minimal 15-20 halaman, ukuran (A4), spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.

Harga berlangganan satu tahun Rp 50.000,00 (2 edisi), dan harga satu edisi Rp 35.000,00. Harga belum termasuk ongkos kirim. Pembayaran melalui Bank Muamalat No. Rek. 7430008666 an. Universitas Darussalam Gontor.

DAFTAR ISI

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik) <i>Arie Rachmat Sunjoto</i>	1
Business System Analysis Based on Multi Level Marketing In The Perspective of Islamic Business Ethics (Case Study: Pt. Veritra Sentosa International) <i>Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania</i>	19
Tax Exemption Goods Trade On ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics <i>Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan</i>	47
Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam <i>Syamsuri, Sabila Rosyida</i>	63
Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2018) <i>Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto</i>	81
Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari <i>Maqāsid Syari'ah</i> Imam Syatibi <i>Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda</i>	93

The Effect of Price and Brand Image of Smartphone  
Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers  
(Case Study Student University of Darussalam Gontor  
Campus 6 Magelang)

*Fadly Arif, Imam Haryadi*

115

# **Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik)**

Arie Rachmat Sunjoto  
Universitas Darussalam Gontor, Jln. Raya siman 06 km,  
Ponorogo Jawa Timur, 63471

Email: [arierachmatsunjoto79@gmail.com](mailto:arierachmatsunjoto79@gmail.com)

## **Abstract**

*Liberalization and deregulation which are at the core of Neo-Classical economic policy have led developing countries to the brink of poverty. Although economic growth has increased but the problem of equity and fulfillment of basic needs cannot be overcome, this can be seen in Indonesia as one of the users of Neo-Classical policies. According to data from the statistics center in March 2017 the number of poor people reached 27.77 million people. Maluku and Papua have been named as the regions with the highest percentage of poor people, namely 24.14% of the total population of Indonesia. This figure is the highest percentage of poverty in Indonesia. Even though Papua is an Indonesian gold barn. In 2011, Indonesia's Gini ratio reached 0.41, meaning that the level of inequality in Indonesia is quite high. This indicates the failure of Neo-Classical policies in building the economy. This research was conducted to find out how Neo-Classical economic policies and Islamic economics in economic development, as well as to find out the views of Islam on Neo-Classical economic policies in economic development. Research research library is a study of criticism using books as a source of research, and using descriptive-analytical methods that provide an overview of Neo-Classical policies with an analysis of Islamic perspectives. Primary data of Adam Smith's thinking from the literature of books, journals, papers, magazines and articles. Secondary data from the thoughts of Islamic economists from the literature of books, journals, papers and articles. The results of the analysis of this study can be seen that Islam has elements of interconnected strategies that can achieve economic development goals, namely the mechanism of moral filtering, correct motivation, socio-economic restructuring, finance, and the role of the State. Five policy actions*

*include human resource development, wealth equity, economic restructuring, financial restructuring, and strategic policy planning. In the Islamic perspective, liberalization is recognized but has social responsibility, while deregulation means anti-government. In Islam the government must be responsible for fulfilling 5 sharia objectives. In implementing development policies and strategies, the government is expected to be able to instill Islamic values in every economic activity by creating a healthy socio-economic without disturbing individual rights and motivating the community with this maqashid Sharia will be achieved.*

**Keywords:** *economic development, economic development strategy, neoliberal*

### Abstrak

Liberalisasi dan deregulasi yang merupakan inti kebijakan ekonomi Neo-Klasik telah mengantarkan negara-negara berkembang kepada jurang kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi masalah pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok tidak dapat diatasi, hal ini dapat dilihat di Indonesia sebagai salah satu pengguna kebijakan Neo-Klasik. Menurut data badan pusat statistik pada bulan maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang. Maluku dan Papua dinobatkan sebagai daerah dengan prosentase penduduk miskin tertinggi yaitu 24,14% dari total seluruh penduduk Indonesia. Angka ini merupakan prosentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Padahal Papua merupakan lumbung emas Indonesia. Pada tahun 2011, rasio Gini Indonesia mencapai 0,41, berarti tingkat kesenjangan di Indonesia cukup tinggi Hal ini menandakan gagalnya kebijakan Neo-Klasik dalam membangun perekonomian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi Neo-Klasik dan ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi, serta untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kebijakan ekonomi Neo-Klasik dalam pembangunan ekonomi. Penelitian *research library* ini adalah studi kritik menggunakan buku sebagai sumber penelitiannya, serta menggunakan metode Deskriptif-Analitis yang memberikan suatu gambaran tentang kebijakan Neo-Klasik dengan analisa perspektif Islam. Data primer pemikiran Adam Smith dari literatur buku, jurnal, makalah, majalah dan artikel. Data sekunder dari pemikiran ekonom Islam dari literatur buku, jurnal, makalah dan artikel. Hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Islam memiliki elemen-elemen strategi yang saling berhubungan yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yaitu mekanisme filter moral, motivasi yang benar, restrukturisasi sosio-ekonomi, keuangan, dan peran Negara. Lima tindakan kebijakan diantaranya pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kekayaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, dan perencanaan kebijakan strategis. Dalam perspektif Islam, liberalisasi diakui keberadaannya tetapi mempunyai tanggung jawab terhadap sosial, sedangkan deregulasi berarti anti pemerintahan. Dalam Islam pemerintah harus bertanggung jawab dalam pemenuhan 5 tujuan syariah. Dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan, pemerintah diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai

*Islami disetiap kegiatan ekonomi dengan cara menciptakan sosio ekonomi yang sehat tanpa mengganggu hak-hak individu serta memotivasi masyarakat dengan ini maqashid syari'ah akan tercapai.*

**Kata kunci:** Pembangunan ekonomi, strategi pembangunan ekonomi, neoliberal

## Pendahuluan

Krisis keuangan global pada tahun 2008 telah mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri.<sup>1</sup> Dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%. Dampak dari krisis global ini, antara lain, menurunnya kinerja neraca pembayaran, tekanan pada nilai tukar rupiah, dan dorongan pada laju inflasi.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah saat orde baru sampai sekarang adalah dalam kerangka berfikir neoliberal. Oleh karena itu, maka tidak salah jika kemiskinan di Indonesia selalu tetap tinggi sebagaimana dilaporkan BPS bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 27,77 juta orang.<sup>2</sup> Ekonomi klasik, neoklasik, dan sosialis, semuanya lahir dari pandangan *enlightenment*, maka dalam pembangunan, mereka lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial. Tidak pula memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui masyarakat.<sup>3</sup> Kegagalan dalam tatanan ekonomi mendorong para ekonom untuk menyusun strategi-strategi dalam suatu pembangunan ekonomi. Salah satu di antara pemikir muslim yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi Islam adalah Muhammad Umer Chapra yang mencoba merumuskan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia 26 Mei 2009, <https://elsaryan.wordpress.com/2009/09/08/krisis-ekonomi-global-2008-serta-dampaknya-bagi-perekonomian-indonesia/>, diakses pada 3 Februari 2018

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id>

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abdin Basri, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 149

paradigma Islam sebagai alternatif pembangunan ekonomi masa depan. Dalam pandangannya gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran Islam sesungguhnya dapat memenuhi premis intelektual bagi sistem ekonomi yang sehat.<sup>4</sup> Dalam pandangan Islam, konsep pembangunan ekonomi merupakan konsep pembangunan “insan seutuhnya” menuju puncak kehidupan “*fi ahsani taqwim*”. Pembangunan yang berlandaskan proses *tazkiyatu al-nafs* guna menciptakan keharmonisan kehidupan melalui proses transformasi sosial yang menyatukan nilai-nilai moral ekonomi dan tingkat pareto optimum yang Islami.<sup>5</sup>

## Pembahasan

### Definisi Pembangunan Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan bisa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto per kapita sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk ke-seluruhan, berapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk.<sup>6</sup> Todaro menyatakan pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup> Menurut Greg Last, pembangunan ekonomi adalah proses penciptaan kemakmuran melalui mobilisasi sumber-sumber daya manusia, finansial, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipasarkan. Termasuk dalam definisi ini yaitu intervensi dalam ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi, proses yang mempengaruhi pertumbuhan dan penstrukturan suatu ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> M Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*,... hlm. 2

<sup>5</sup> Sigit pramono, *Keuangan Syariah Dan Konsensus Baru Pembangunan Ekonomi*, artikel dari <http://www.pk-sejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariah-dan-konsensus-baru-pembangunan-ekonomi.htm>, diakses pada 3 Februari 2018

<sup>6</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, vol. 1 (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 16

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>8</sup> Mit Witjaksono, “Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan”, *Jurnal Ekonomi dan Studi*



## Definisi Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi ekonomi dalam sistem apapun adalah suatu usaha dengan menggunakan sarana-sarana ekonomi yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan masyarakat.<sup>9</sup> Dalam ilmu ekonomi istilah ini dimaksudkan untuk mempengaruhi mekanisme kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kerja dan fungsinya yang akan membuatnya mencapai tujuannya, yang mana hal terpenting adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>10</sup> Dalam arti keseluruhan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk kebijakan dan program sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi seperti mengatasi inflasi dan meningkatkan kesempatan kerja serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. Kebijakan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis untuk yang lemah.

## Pengertian Neoliberal

Membahas neoliberal akan sulit jika tidak menyinggung apa itu liberalisme. Paham liberalisme berkonotasi luas, dapat mengacu pada paham ekonomi maupun politik. Dalam sistem politik ekonomi Amerika Serikat, liberalisme dipergunakan sebagai strategi untuk menghindarkan konflik sosial. Liberalisme asal mulanya merupakan bentuk perjuangan kaum *bourgeois* menghadapi konservatif. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Liberalisme dapat terjadi pada sektor ekonomi ataupun sektor-sektor lain.<sup>11</sup> Istilah neoliberalisme yang luas digunakan dewasa ini pada mulanya adalah nama yang dipakai para pejuang demokrasi di Amerika latin untuk menggambarkan watak ideologis kolusi antara rezim kediktatoran dan ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrim.<sup>12</sup> Kata “neo” dalam neoliberalisme sesungguhnya

---

*Pembangunan*, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, No. 1 Vol. 1, 2009), hlm. 1-12

<sup>9</sup> Muhammad Anas al-Zarqa, *al-Siyāṣah al-iqtisādiyyah wa al-Takhtīt fi al-iqtisād al-Islamiy*, (Oman: Majma'u al-Mulkiy Libuhuts al-Haḍārah al-Islamiyah, 1990), hlm. 1219

<sup>10</sup> 'Ali bin Muhammad al-Jum'ah, *Mu'jam al-mustalahāt al-iqtisādiyyah wa al-Islāmiyah*, (al-Riyad: Maktabah al-'abyakān, 2000), hlm. 335

<sup>11</sup> Mansour Fakh, *Bebas dari Neoliberalisme*, cet. II (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), hlm. 53

<sup>12</sup> B. Herry Priyono, “Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: Dari Filsafat Moral

merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberal lama di mana pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja. Pemerintah diharuskan melakukan deregulasi dengan cara mengurangi restriksi pada industri, mencabut hambatan-hambatan birokratis perdagangan ataupun menghilangkan tarif demi menjamin terwujudnya *free trade*. Dengan demikian, liberalisme berkonotasi bebas dari pemerintah, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis mencari keuntungan sebesar-besarnya.<sup>13</sup>

### Filsafat Dasar Neoliberalis

Jantung dari gagasan ekonomi neoliberalisme adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu-lintas barang atau jasa tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu juga hanya akan terjadi apabila digerakan oleh konsep *homo economicus*, yaitu barang dan jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh perorangan yang akan menggerakannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya, sehingga *private property* pun menjadi absolut tanpa tanggung jawab peran sosial apapun kecuali untuk akumulasi laba privat sebesar-besarnya.<sup>14</sup> Filsafat dasar ekonomi neoliberal sebagaimana yang dijelaskan oleh Herry Priyono dalam Wibowo dan Francis Wahono, bahwa manusia adalah *homo economicus*. Itulah ontologi manusia. Gagasan itu mencapai dua hal:<sup>15</sup>

- a. Hubungan-hubungan antar pribadi dan sosial harus dipahami dengan menggunakan konsep dan tolak ukur ekonomi.
- b. Prinsip ekonomi juga merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan suatu negara.

### Sistem Pasar Bebas

Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.<sup>16</sup> Dalam prosesnya tersebut diharuskan adanya asas moralitas,

---

ke Ilmu Sosial", *jurnal DISKURSUS*, (Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Vol. VI No. 1, 2007), hlm. 8.

<sup>13</sup> Mansour Fakhri, *Bebas dari Neoliberalisme...*, hlm. 53

<sup>14</sup> Wibowo dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas 2004), hlm. 59

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 54-55

<sup>16</sup> A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika*

antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).<sup>17</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Triatmojo, neoliberalisasi bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.<sup>18</sup> Sistem pasar dapat dibedakan atas dasar titik tekanannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Adanya kebebasan individu yang tidak terbatas untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepemilikan, dan pengelolaan properti privat.
- b) Ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemenuhan kebutuhan menurut preferensi individual.
- c) Mengutamakan kekuatan pasar dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dan meminimalkan peran pemerintah.

#### Deregulasi atau Penghapusan Peran Pemerintah

Sejalan dengan sistem kebebasan kodrat dan keadilan, Smith tampaknya mempunyai pandangan yang kontradiktif mengenai fungsi dari pemerintahan. Demi menjamin kebebasan kodrati, Smith tidak menolak campur tangan pemerintah atau kendali, secara khusus, atas kegiatan ekonomi. Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan sebagaimana telah dikatakan, demi menjaga tatanan sosial dan keamanan setiap orang.<sup>20</sup> Pandangan Smith yang tampak saling bertentangan tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda dari banyak orang tentang teori Smith mengenai peran negara. Sehingga penafsiran tersebut memunculkan tiga pendekatan yaitu *libertarian anarkistis*, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan negara yang minimal-efektif.

---

*Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 22.

<sup>17</sup> Wikipedia, "Adam Smith", sumber dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Adam\\_Smith](https://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith), diakses pada tanggal 22 Februari 2018

<sup>18</sup> Triatmojo, "Neoliberalisme", sumber dari <http://triatmojo.wordpress.com/tag/politik>, diakses pada tanggal 24 Februari 2018

<sup>19</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi...*, hlm. 151

<sup>20</sup> A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith...*, hlm. 171.

### 1. Libertarian Anarkistis

Pendekatan ini beranggapan bahwa Smith membela harmoni sosial tanpa campur tangan dari luar. Dengan kata lain, Smith menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap orang. *Laissez faire* lalu diartikan biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah lalu dianggap tidak terlalu berperan dalam bidang ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu.<sup>21</sup> Smith berpendapat bahwa campur tangan atau kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang secara apriori harus ditolak karena merugikan. Ia menerima bahwa setiap orang tahu lebih baik tentang apa yang baik baginya, melebihi penguasa. Karena itu, penguasa yang berusaha mengarahkan rakyatnya tentang bagaimana mereka seharusnya menanamkan modalnya, tidak hanya membebani dirinya dengan perhatian yang sangat tidak perlu, melainkan juga mendapat kekuasaan yang tidak akan diberikan pada orang tertentu, dewan atau senat mana pun, dan di mana pun tidak akan demikian berbahaya di tangan seseorang yang bodoh dan pongah menganggap dirinya cocok menjalankan kekuasaan tersebut.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Kelembagaan

Smith mengusulkan sebuah tatanan kelembagaan yang baru di mana usaha mengejar kekayaan pribadi akan lebih bisa memajukan kesejahteraan bersama. Smith tidak membela suatu dogma bahwa fungsi pemerintah di bidang ekonomi harus ditolak secara mutlak. Yang dilakukan Smith adalah mengajukan sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan pemerintah.<sup>23</sup>

### 3. Pendekatan negara minimal-efektif

Peran minimal ini berlaku dalam semua bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ini berarti di satu pihak

---

<sup>21</sup> A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith...*, hlm. 171.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 172

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 174-175

kebebasan kodrati dan keadilan dipertahankan oleh sistem ekonomi yang bebas dan alamiah itu sendiri. Namun di pihak lain, dalam situasi tertentu, tangan alam akan terjelma melalui tangan negara tanpa mengambil alih tangan alam. Karena itu yang ditolak dan ditentang Smith adalah kegiatan dan fungsi negara yang bersifat distorsif bagi kegiatan ekonomi pasar bebas dari semua pelaku. Kecenderungan pemerintah yang ditentang adalah keinginan untuk mengatur segala kegiatan ekonomi hanya demi keuntungan suatu kelompok tertentu, sehingga terlanggarnya hak orang lain. Smith sendiri mendukung campur tangan pemerintah sejauh dibutuhkan demi penegakan keadilan.<sup>24</sup>

### Strategi Pembangunan Ekonomi Islam

Islam memiliki strategi dalam sistem ekonomi dengan empat elemen yang saling memperkuat, diantaranya:

#### 1. Mekanisme Filter

Kelangkaan sumber-sumber daya relatif dibandingkan dengan keinginan-keinginan yang tidak terbatas, meniscayakan adanya suatu perangkat penyaringan. Mekanisme pasar berfungsi sebagai filter pada ekonomi kapitalis. Harga-harga menciptakan ekuilibrium antara permintaan dan penawaran dengan cara menentukan bukan apa saja, juga bagaimana konsumen yang bertujuan memaksimalkan nilai guna akan mengkonsumsi dan para produsen guna bertujuan memaksimalkan keuntungan akan memasok barang.

Penggunaan sistem pasar saja sebagai sebuah filter akan menggagalkan realisasi sasaran sosio-ekonomi. Prefrensi individual yang tidak terhalang dibarengi dengan promosi iklan yang bebas nilai dan kemudahan memperoleh kredit, menciptakan keinginan yang tidak terbatas. Sementara distribusi pendapatan yang tidak merata menjadikan yang kaya mampu menggunakan sumber-sumber daya langka untuk memenuhi keinginan mereka yang tidak penting. Hal ini tidak saja menekan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok, melainkan juga memperlebar gap tabungan-investasi, ekspor-impor dan memperburuk ketidak seimbangan makro ekonomi dan eksternal.

Islam mempunyai perangkat lain untuk melengkapi mekanisme harga yaitu filter moral. Pada alokasi sumber daya akan

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 177-178.

dipasang dua lapis filter. Filter pertama menyerang persoalan keinginan yang tidak terbatas pada pusat muaranya, kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala preferensi seiring dengan tuntutan kedudukannya sebagai *khalifah* dan prinsip keadilan. Islam mewajibkan kaum muslim untuk mencoba potensi pada sumber-sumber daya melalui filter nilai-nilai Islam sehingga sebagian dapat dieliminasi sebelum dapat diapresiasi dalam pasar. Dengan ini penggunaan sumber daya yang tidak menyumbang secara positif dapat dihilangkan sebelum memasuki filter kedua, yaitu harga yang ditentukan oleh pasar.<sup>25</sup>

## 2. Motivasi

Efisiensi dan pemerataan tidak dapat direalisasikan hanya dengan sebuah mekanisme filter yang benar. Diperlukan motivasi untuk mendorong individu. Kapitalisme menganggap bahwa kepentingan diri sendiri akan mendorong individu memaksimalkan efisiensi, sementara kompetisi akan berfungsi sebagai batas kepentingannya dan membantu melindungi kepentingan sosial. Akan tetapi kepentingan diri sendiri yang pandangannya terbatas pada dunia ini saja, akan menuai ketamakan, pengabaian moral dan melupakan kepentingan orang lain. Menurut hasil pengamatan *The Economics* dalam bukunya Umer Chapra menyatakan bahwa setiap ada kesempatan, agen rasional ekonomi akan mencoba menarik manfaat untuk dirinya sendiri dengan mengabaikan siapa saja. Dalam banyak hal solusi pasar digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang biasanya membuat pasar bekerja.

Sekiranya dimensi keimanan kepada pembalasan di depan Allah dan kehidupan setelah kematian diinjeksikan, maka suatu rasionalitas yang lebih tinggi telah diciptakan. Kepercayaan ini mengandung implikasi bahwa kepentingan individu tidak saja akan dipenuhi dengan perbaikan kondisi kehidupan di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena itu, jika memang benar-benar rasional dan mencari apa yang menjadi kepentingan terbaiknya, maka seseorang tidak akan bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek keduniawiaannya saja, melainkan juga akan mencoba menjamin kepentingan jangka panjangnya dengan bekerja untuk kemashlahatan orang lain lewat reduksi dalam konsumsinya yang tidak penting dan mubadzir, meskipun secara finansial ia mampu

---

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 218.

melakukannya.

Dengan demikian, sumber-sumber daya dapat dialihkan untuk menambah produksi dan distribusi barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi orang miskin sehingga membantu memenuhi kepentingan mereka. Begitu pula kepercayaan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibandingkan akhirat, hal ini dapat mencegah pelaku bisnis untuk memperkaya diri sendiri melalui cara yang tidak jujur. Dengan begitu, ia akan membantu orang lain karena tidak menghalangi peluang bagi orang lain.<sup>26</sup>

### 3. Restrukturisasi Sosio-Ekonomi dan Keuangan.

Mekanisme filter dan motivasi tidak akan berdaya sekiranya tidak dilengkapi dengan sebuah lingkungan sosio-ekonomi dan politik yang kondusif untuk merealisasikan tujuan. Lingkungan sosial harus kondusif bagi pelaksanaan aturan keamanan dengan tidak membolehkan kepemilikan materi dan konsumsi pamer. Restrukturisasi sosial dan ekonomi akan dapat diperkuat oleh reformasi politik sehingga terjadi penyebaran pusat-pusat kekuasaan di masyarakat, yang akan menyulitkan siapa saja yang mengeruk keuntungan dengan mengeksploitasi posisi sosial, ekonomi, ataupun politik.

Restrukturisasi demikian harus sistematis dan koheren, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan program reformasi jangka panjang, jelas, dan berorientasi kepada tujuan. Restrukturisasi harus bertujuan untuk:

- a. Menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi individu untuk melakukan tugasnya dengan sasaran merelalisasikan efisiensi dan pemerataan.
- b. Mereduksi konsentrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi, dan politik yang berlaku.
- c. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi, dan politik termasuk keuangan publik, lembaga finansial menurut ajaran-ajaran Islam dan membantu meminimalkan konsumsi yang tidak perlu, mendorong investasi untuk memenuhi kebutuhan pokok, ekspor, dan peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha.

---

<sup>26</sup> M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi...*, hlm. 220-222

#### 4. Peran Negara

Restrukturisasi demikian tidak mungkin diwujudkan kecuali jika negara berperan aktif dalam perekonomian. Ia harus memberikan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilai-nilai Islam. Namun peran negara dalam ekonomi Islam tidak seperti "intervensi" pemerintah yang tetap komitmen pada kapitalisme *laissez faire*. Tidak seperti kolektivitas yang mencekik kebebasan dan inisiatif individu. Ia adalah sebuah peran positif, suatu kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian, dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok berkuasa yang berkepentingan. Namun, apapun peran pemerintah, ia harus berperan dalam batasan-batasan syari'ah.

Islam memiliki kriteria tersendiri bagi pemerintahan. Kriteria pertama legitimasi adalah pemerintahan harus bertanggung jawab kepada Allah, pembuat undang-undang yang berdaulat dan merupakan sumber primer syari'ah. Ini mengandung implikasi bahwa pemerintah sebenarnya terbatas dan tidak mutlak. Pemerintah itu sendiri harus terikat pada syariat dan melakukan segala hal yang mampu menjamin pemenuhannya. Kriteria kedua adalah pertanggung jawaban pemerintah di depan rakyat. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah merupakan amanat dari Allah dan juga dari rakyat yang diberikan kepada mereka untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan. Kriteria ketiga adalah berlakunya permusyawaratan. Maksud permusyawaratan disini adalah sebuah institusi otonom bagi pembahasan semua permasalahan atau isu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dalam kerangka syari'ah yang bebas dari rasa takut, bebas, merdeka, serta implementasi jujur oleh semua kebijakan eksekutif. Kriteria keempat adalah persamaan semua orang di depan hukum dan keadilan yang merata seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58.

#### Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam

Tindakan kebijakan yang disarankan untuk memecahkan persoalan di negara-negara muslim dapat dikelompokkan dalam lima dimensi, diantaranya:



## 1. Menghidupkan Faktor kemanusiaan

Untuk merealisasikan tujuan dalam lingkungan politik yang kondusif adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan semua yang diperlukan bagi kepentingan alokasi yang efisien dan distribusi sumber-sumber daya yang merata. Individu harus bersedia melakukan yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien, integritas, jujur dan disiplin. Mereka harus bersedia mengubah pola perilaku konsumtif, menabung dan investasi selaras dengan apa yang dituntut dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan laju pertumbuhan, mengurangi ketidak seimbangan makro ekonomi dan akhirnya mewujudkan maqashid.

## 2. Restrukturisasi ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, tanpa adanya penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.

Dalam merestrukturisasi pola konsumsi Islam menghendaki bahwa suatu reduksi dalam konsumsi harus dilakukan dengan suatu cara dimana standar pemenuhan kebutuhan si miskin tidak makin buruk, melainkan harus ditingkatkan. Ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tidak selalu karena kurangnya sumber daya, tetapi lebih disebabkan oleh kegagalan untuk mengadopsi suatu pola konsumsi yang seirama dengan sumber-sumber daya yang tersedia.

Untuk mengurangi konsumsi terlebih dahulu membedakan mana kebutuhan yang penting dan kebutuhan kurang penting terhadap sumber daya yang tersedia, serta menggolongkan semua barang dan jasa ke dalam kategori kebutuhan dan kemewahan.

Islam mengelompokkan kebutuhan kepada tiga kelompok, primer (*darūriyah*), sekunder (*hajjiyah*), dan tersier (*taḥṣīniyah*). Harus dilakukan di sini adalah pemenuhan segala hajat kepentingan bagi semua masyarakat. Sasaran ini akan terjadi jika perbedaan-perbedaan dalam tingkat konsumsi yang telah diperbolehkan menurut status dan pendapatan individu tidak berada pada wilayah diluar jangkauan sumber-sumber ekonomi. Hal ini tidak boleh dilakukan untuk merefleksikan gaya pamer atau berlebih-lebihan sehingga mengarah pada kesenjangan sosial yang lebih lebar.

### 3. Restrukturisasi Keuangan

Pembiayaan adalah alat ekonomi, sosial, dan politik yang perkasa dalam dunia modern. Ia berperan sangat penting, bukan hanya dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan sebuah perekonomian.

Sumber-sumber daya keuangan berasal dari deposito yang ditiptipkan oleh semua masyarakat, maka dana tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat dan tidak dipergunakan untuk memperkaya yang berkuasa dan sudah kaya. Akan tetapi, karena sumber daya tersebut terbatas, maka pemanfaatan pun harus secara merata dan efisien, hal ini dapat terjadi apabila dana ini digunakan untuk:

- a. Usaha-usaha
- b. Produksi, impor, dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua anggota masyarakat.

Meskipun sistem keuangan sudah beroperasi dengan basis bagi hasil, masih perlu menghapuskan dua penyebab utama kegagalan atau ketidakmampuan bank-bank komersil mengulurkan kredit bagi pertanian kecil dan UMKM. *Pertama* adalah menghapuskan kerugian ekonomi yang serius di tempat beroperasinya sektor ini, *kedua* adalah menghapuskan resiko dan pengeluaran lebih besar bagi perbankan komersial.

Pandangan Islam terhadap Kebijakan Neoklasik

Deregulasi

Deregulasi dengan kata lain berarti anti intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan Islam sebagaimana yang dijelaskan, pemerintah harus bertanggung jawab atas anggotanya serta membahagiakan mereka dengan menghilangkan semua praktek yang mengancam kesejahteraan umum. Individu pemilik yang bermental egois mengancam pihak lain, pemerintah harus mengintervensi dan melarang operasional individu ini.<sup>27</sup>

Pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dengan berbagai cara, yang semuanya mungkin tidak memenuhi keadilan distributif. Maka, deregulasi yang dicanangkan oleh para neoliberal sesungguhnya bukan untuk mencapai keadilan distributif karena

---

<sup>27</sup> M. Faruq Al-Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000), hlm. 22

kebijakan ini hanyalah untuk melancarkan kaum kapitalis mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada regulasi apapun yang merintanginya. Maka dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan Naqvi,<sup>28</sup> ekonomi Islam memiliki prinsip *al-'adl wa al-ihsan* yaitu mewujudkan masyarakat adil khususnya bagi masyarakat miskin dan lemah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Baqir al-Shdar dalam M.N. Siddiqi,<sup>29</sup> negara mempunyai beberapa tugas, disamping memberikan jaminan sosial, negara juga mempunyai tugas untuk menjamin pemenuhan kebutuhan untuk tiap warga negaranya serta menciptakan keseimbangan pada standar hidup dalam masyarakat. Tanggung jawab langsung terhadap jaminan sosial, didasarkan atas hak umum dari seluruh masyarakat terhadap sumber-sumber alam dan karena adanya kenyataan bahwa sebagian warga masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk bekerja, juga punya hak terhadap sumber-sumber alam tersebut.

### Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan:

- a. Kebijakan pembangunan ekonomi neoklasik atau neoliberal tidak jauh berbeda dengan ekonomi klasik yaitu mekanisme pasar dan pengurangan peran negara dalam kegiatan perekonomian. Dalam pengurangan peran negara, ekonomi neoliberal melihat jika semua orang dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang diinginkan maka akan menyebabkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara, dalam jangka panjang kebebasan ini akan mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sedangkan dalam mekanisme pasar, pencapaian kesejahteraan umum tidak dengan pengejaran kesejahteraan yang disengaja, tetapi secara keseluruhan kesejahteraan sebagai hasil dari gerakan seseorang untuk kepentingan diri masing-masing.
- b. Islam memiliki strategi dalam pembangunan ekonomi yang meliputi reorganisasi keseluruhan sistem ekonomi dengan empat elemen yang saling memperkuat, diantaranya: mekanisme filter, motivasi, restrukturisasi sosio ekonomi

<sup>28</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 32

<sup>29</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, terj. Saifuddin, *at.al*, (Jakarta: LIPPM, 1986), hlm 30

dan peran negara. Serta tindakan kebijakan yang disarankan untuk memecahkan persoalan di negara-negara muslim yang dikelompokkan dalam lima dimensi, diantaranya: menghidupkan faktor kemanusiaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan.

- c. Islam berpandangan bahwa persaingan bebas dan mekanisme pasar telah mencapai kemakmuran ekonomi di pasar. Seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan ekspansi kekayaan, tetapi kemakmuran ini tidak menghapus masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, bahkan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Maka diperlukan filter moral untuk sampai ke tujuan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

#### Saran

- a. Bagi pemerintah agar lebih berpartisipasi secara efisien dan efektif dalam pembangunan. Efektifitas peran itu antara lain tercermin pada dorongan pemerintah terhadap pengembangan sektor domestik, pertanian dan bisnis skala kecil. Pemerintah juga harus memastikan pengelolaan sumber daya alam dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Bagi pemerintah harus berperan positif dan berorientasi pada sasaran pembangunan ekonomi, peran ini dapat dilaksanakan lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio ekonomi sehat dan pengembangan institusi yang tepat.

#### Daftar Pustaka

- al-Jum'ah, 'Ali bin Muhammad. 2000. *Mu'jam al-muṣṭalahāt al-iqtisādiyyah wa al-Islāmiyah*. al-Riyad: Maktabah al-'abyakān.
- Al-Nabhan, M. Al-Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press
- Al-Zarqa, Muhammad Anas. 1990. *al-Siyāsah al-iqtisādiyyah wa al-Takhtīt fī al-iqtisād al-Islamiy*. Oman: Majma'u al-Mulkiy Libuhuts al-Hadārah al-Islamiyah.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. terj. Ikhwan

- Abdin Basri. Jakarta: Gema Insani Press
- \_\_\_\_\_. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Ihkwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press
- Fakih, Mansour. 2004. *Bebas dari Neoliberalisme*. Cet. II. Yogyakarta: INSIST Press
- Keraf, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Priyono, B. Harry. 2007. "Adam Smith Dan Munculnya Ekonomi." *Jurnal DISKURSUS*. Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Vol. VI No. 1
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. terj. Saifudin, et.al. Jakarta: LIPPM
- Todaro, Michael P. 2009 *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Wahono, Francis Wibowo. 2004. *Bebas Dari Neoliberalisme*. Cet. II. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas
- Witjaksosno, Mit. 2009. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Vol. 1, No. 1